

MENINGKATKAN KECERDASAN BERDEMOKRASI MELALUI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS BASIS GEREJANI BAGI WARGA DESA BULAN, KABUPATEN MANGGARAI

Fransiskus Sales Lega

Prodi Teologi, Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus,
Jl. Ahmad Yani, No. 10, Ruteng, Flores 86508
e-mail: franslega78@gmail.com

Abstract: *Increase Democratic Intelligence by Empowerment Church Basic Community for the Peoples at Bulan Village, Manggarai.* Democracy is a system of government with controlling power held by the people. Indonesia is one of the country in the world that follow democracy system. Reformation movement in 1998 brought a significant changing for democracy system ini Indonesia. The implementation of the reformation movement is decentralization of power. The implication is the people simply to control power of their representatives. The idealism like this will be realize if the people have full of knowledge dan high awareness about their role in nation state building. From the results of the initial survey it was found that the people at Bung-Bulan Village, Manggarai, East Nusa Tenggara have lack of knowledge dan low of awareness about politic or democracy. Those facts are very dangerous or very bad for democracy building in Indonesia. Those facts make perpetuate elite domination in politic, moreover they will become politic instrument of the elite. Therefore, there should be efforts to overcome those problems. This Community Service Program (Pengabdian kepada Masyarakat-PkM) on the increasing democratic intelligence by empowerment church basic community is offered as a solution to overcome the problem lack of knowledge dan low of awareness about politic or democracy. The empowerment is done by giving knowledges about politic or democracy dan reinforcing assets of church basic community as social movement. As a result, knowledge and awareness of the people in Bung-Bulan Village increase, active participate in general election, have high commitment to obey money politics, grow a new awareness about participation in controlling government power, and appearing a new understanding about the existence of church basic community is not only as faith institution, but also as forum for social movement in grass root.

Keywords: *democratic intelligence, empowerment, church basic community*

Abastrak: *Meningkatkan Kecerdasan Berdemokrasi melalui Pemberdayaan Komunitas Basis Gerejani bagi Warga Desa Bulan, Kabupaten Manggarai.* Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem demokrasi. Gerakan reformasi 1998 telah membawa perubahan yang signifikan bagi sistem demokrasi di Indonesia. Salah satu implementasinya adalah desentralisasi kekuasaan. Implikasinya adalah rakyat lebih mudah mengontrol pelaksanaan kekuasaan oleh para wakilnya. Idealisme seperti ini terjadi bila masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai dan kesadaran yang tinggi tentang perannya dalam membangun bangsa dan negara. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak warga negara yang belum memiliki pengetahuan yang memadai dan kesadaran tanggung jawabnya yang tinggi dalam membangun bangsa dan negara. Dari survei awal ditemukan bahwa masyarakat Dusun Bung dan Desa Bulan, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur kurang memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang demokrasi atau politik. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya kesadaran tentang demokrasi atau politik sangat berbahaya bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Kenyataan seperti ini dapat melanggengkan dominasi elit. Rakyat tidak mampu menjalankan perannya secara optimal, bahkan mereka bisa menjadi instrument politik para elit. Karena itu perlu ada upaya yang serius untuk mengatasinya. Untuk mengatasi hal ini, Tim PkM STKIP Santu Paulus menawarkan kegiatan pembedayaan Komunitas Basis Gerejani (KBG) untuk meningkatkan kecerdasan politik atau demokrasi. Pemberdayaan ini dilakukan dengan jalan memberikan pendidikan politik dan memperkuat asset-asset Komunitas Basis Gerejani sebagai suatu gerakan sosial. Hasilnya adalah pengetahuan dan kesadaran politik atau demokrasi meningkat, terlibat aktif dalam pemilihan umum, ada komitmen yang tinggi untuk menolak politik uang, ada kesadaran baru tentang perlunya keterlibatan dalam mengontrol kekuasaan, dan munculnya kesadaran baru tentang eksistensi KBG yang tidak hanya sebagai wadah pembetulan iman, tetapi juga wadah gerakan sosial masyarakat akar rumput.

Kata kunci: *kecerdasan berdemokrasi, pemberdayaan, komunitas basis gerejani.*

PENDAHULUAN

Perkembangan demokrasi di Indonesia pascatumbangnya rezim represif-otoriter Orde Baru memang tampak menggembirakan. Kita tidak bisa menegasikan bahwa spirit reformasi telah membidani lahirnya pelbagai usaha untuk menata kembali lembaga-lembaga negara dan partai-partai politik, serta membentuk lembaga-lembaga atau komisi-komisi baru. Meskipun demikian, kami melihat bahwa pembaharuan atau perubahan yang terjadi masih sangat terbatas pada aspek institusional dan formal-prosedural. Belum ada transformasi yang substansial dan signifikan berkaitan dengan perilaku dan orientasi politik para elit. Demokrasi yang diindikasikan oleh partisipasi aktif rakyat dalam ruang publik belum optimal. Kedaulatan rakyat justru “dirampok” dan “diringkus” oleh segelintir orang yang haus kekuasaan, kehormatan, dan kekayaan. Rakyat dibiarkan memiliki pemahaman yang fragmentaris tentang politik agar mudah ditipu dan diperdaya. Para calon pemimpin seringkali menjadikan rakyat sebagai sarana untuk memuluskan ambisi kekuasaan. Politik yang mengusung cita-cita memanusiakan manusia justru membuat manusia menjadi tidak manusiawi. Politik bahkan menjadi arena untuk merendahkan dan menghancurkan sesama. Hal ini menunjukkan bahwa politik masih harus terus dibenahi agar mencapai tujuan luhurnya, yakni kesejahteraan umat manusia.

Politik demokrasi pada hakikatnya diusahakan untuk memajukan atau meningkatkan kualitas kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Politik demokrasi membuat manusia menjadi semakin manusiawi. Itu berarti politik adalah sarana atau alat untuk membantu manusia merealisasikan potensi-potensinya. Bukan sebaliknya, manusia sebagai sarana politik. Politik demokrasi harus

mewujudkan respek terhadap martabat manusia.

Politik demokrasi diindikasikan oleh partisipasi aktif masyarakat dalam segala usaha mewujudkan kemaslahatan bersama. Itu berarti bahwa masyarakat harus memiliki pemahaman yang memadai tentang politik demokrasi. Rakyat harus menyadari diri sebagai pemegang kedaulatan. Karena itu, dalam memilih pemimpin atau wakilnya, mereka harus kritis dan selektif. Kritis artinya mampu menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional. Mereka harus mampu memilih pemimpin atau wakilnya yang memiliki kapabilitas dan akuntabilitas untuk memimpin. Selektif artinya rakyat harus mampu memilah dan memilih pemimpin yang baik dan benar. Mereka harus mampu memilih berdasarkan putusan hati nurani.

Gerakan reformasi politik 1998 dimaksudkan untuk menghilangkan “sandiwara demokrasi” rezim Orde Baru menjadi pesta demokrasi warga yang rasional dan mandiri. Reformasi politik bertujuan untuk mewujudkan kemandirian rakyat dalam mewujudkan kemaslahatan bersama. Meskipun demikian, cita-cita besar dan luhur itu belum terwujud. Dalam usianya yang kedua puluh, gerakan reformasi itu belum menunjukkan perubahan yang fundamental. Pertanyaan kita adalah bagaimana upaya mewujudkan warga negara yang rasional dan mandiri dalam berdemokrasi? Tentu sudah ada banyak upaya yang telah dilakukan oleh para pemerhati masalah sosial maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam rangka mengatasi krisis demokrasi. Ada geliat perubahan dari upaya mereka, namun belum signifikan. Penulis menengarai bahwa hal ini disebabkan oleh pendekatan yang kurang jitu. Pendekatan *top-down* dan model “proyek” tentu tidak menciptakan transformasi yang fundamental dan permanen. Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Prodi Pendidikan Teologi melihat bahwa krisis demokrasi

di atas membutuhkan wadah yang tepat dan pendekatan yang *bottom-up*. Hal seperti ini sangat mungkin dalam konteks Komunitas Basis Gerejani (KBG). KBG bisa menjadi salah satu wadah yang efektif untuk mengatasi krisis demokrasi karena KBG adalah komunitas akar rumput (*grass root community*). Pemberdayaan KBG bisa menjadi salah langkah efektif untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan praktik demokrasi warga.

Secara historis, Komunitas Basis Gerejani adalah persekutuan orang-orang yang memiliki keprihatinan terhadap masalah sosial. KBG pada awalnya adalah suatu gerakan transformasi sosial. Mereka memiliki kepekaan terhadap permasalahan sosial. Masalah-masalah sosial didiskusikan dan dianalisis secara mendalam untuk menentukan alternatif-alternatif pemecahannya. Kesadaran akan masalah bersama membuat mereka solid menyatukan kekuatan-kekuatan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Di dalam komunitas itu, mereka memilih pemimpin. Pemimpin yang dipilih adalah orang mampu menyuarakan kepentingan-kepentingan mereka.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa Staf Desa Bulan (wawancara, 29 September 2018) dan tokoh masyarakat (wawancara, 06 Oktober 2018), kami menemukan bahwa Komunitas Basis Gerejani belum diberdayakan sebagai wadah gerakan sosial kemasyarakatan. KBG masih berkuat pada urusan kesalehan dan keselamatan akhirat. Kegiatan-kegiatannya masih bercorak liturgis atau ibadat. KBG belum menjadi wadah di mana masyarakat membicarakan masalah-masalah hidupnya, menganalisis sebab, merencanakan jalan pemecahannya dan bergerak bersama mengupayakan perubahan-perubahan sosial berdasarkan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan bersama di dalam KBG. Hal seperti ini membuat warga Desa Bulan terlilit masalah sebagai berikut. *Pertama*, rendahnya

pemahaman masyarakat tentang politik. Politik selalu direduksi pada kontestasi kekuasaan. Akibatnya, politik hanya dimaknai sebagai urusan elit atau urusan mereka yang mau merebut kekuasaan dalam masyarakat. Bahkan, masyarakat menganggap politik sebagai sesuatu yang kotor. *Kedua*, masyarakat kurang bersikap kritis dan selektif dalam memilih pemimpin. Pemimpin dipilih berdasarkan latar belakang suku, bukan kapabilitasnya. Bahkan, pilihan bukan berdasarkan hati nurani, tetapi karena telah menerima uang dari tim sukses calon tertentu. *Ketiga*, lemahnya partisipasi dalam mengontrol jalannya roda pemerintahan. Warga desa belum menunjukkan peran kontrolnya terhadap kekuasaan. Hak politik hanya dilihat dalam kaitan dengan penggunaan hak pilih.

Kegiatan PkM yang terdiri atas tim Dosen Prodi Pendidikan Teologi dilaksanakan di Dusun Bung, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng. Kelompok sasaran kegiatan ini adalah warga KBG yang ada di wilayah Dusun Bung. Warga Desa Bung adalah juga warga KBG dalam konteks pemerintahan Gerejani. Kami memilih pemberdayaan KBG dalam rangka meningkatkan kecerdasan berdemokrasi karena beberapa pertimbangan berikut. *Pertama*, KBG bukan hanya komunitas iman, tetapi juga komunitas sosial. Justru awal mula kelahirannya, KBG dimaksudkan sebagai sebuah gerakan sosial di dalam Gereja. Gerakan sosial ini tentu berkarakter khusus karena gerakan sosial ini diinspirasi oleh nilai-nilai Kitab Suci. Karena itu, pembicaraan di dalam KBG tidak melulu tentang iman, tetapi bagaimana ajaran iman itu dilihat dalam kerangka pengalaman sosial manusia. *Kedua*, umat di dalam KBG memiliki program pertemuan yang bersifat periodik atau berkala. Mereka selalu berkumpul bersama pada bulan Maret untuk mengadakan katekese Aksi Puasa Pembangunan (APP), berdoa rosario pada bulan Mei dan Oktober, *sharing* kitab suci pada Bulan Kitab Suci

Nasional setiap bulan September. Kondisi seperti memungkinkan mereka untuk membicarakan persoalan hidup bersama. Pembicaraan masalah bersama di dalam KBG menjadi kesempatan bagi umat atau rakyat untuk belajar berdemokrasi. *Ketiga*, KBG juga memiliki struktur dan pembagian tugas. Kenyataan seperti ini juga bisa menjadi kesempatan bagi umat untuk belajar berdemokrasi.

Melalui kegiatan PkM, Tim Dosen Prodi Pendidikan Teologi berikhtiar untuk membantu masyarakat atau warga KBG di Dusun Bung agar menjadi warga

negara yang cerdas dalam berdemokrasi. Karena itu, kegiatan PkM ini didesain secara sistematis agar hasilnya terukur. Melalui kegiatan PkM ini, warga Dusun Bung diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang siap menyosong Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Ini tentu kepentingan jangka pendeknya. Tujuan jangka panjangnya adalah warga Dusun Bung menjadi warga negara yang aktif dan cerdas dalam berdemokrasi. Mereka diharapkan mampu berpartisipasi dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik dan mengontrol jalannya pemerintahan.

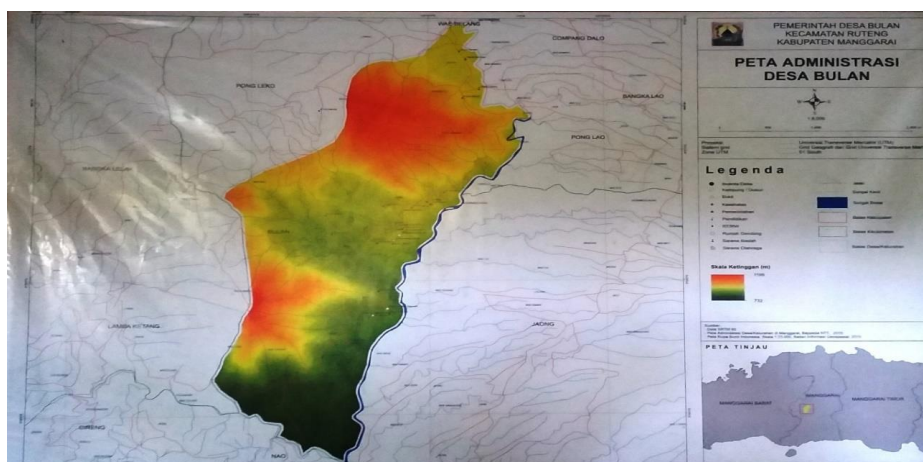
ANALISIS SITUASI MASYARAKAT

Kegiatan PkM ini dilaksanakan di Dusun Bung, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Desa Bulan merupakan salah satu desa dari sembilan belas desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Desa Bulan mendapat pengakuan resmi pada tahun 1970. Kepala desa pertama adalah Bapak Stefanus Mangkak. Di dalam rapat penentuan nama desa, forum yang hadir bersepakat memberi nama desa yaitu Desa Bulan. Nama Desa Bulan merupakan akronim dari lima anak kampung: Bung, Gulung, Leko, Anam, Nangka. Karena Wilayah administrasi Desa sangat luas, maka pada tahun 1999

Desa Bulan dimekarkan. Desa pemekaran ini diberi nama Desa Pong Leko. Wilayahnya mencakupi Kampung Gulung dan Kampung Manggaluwa. Dengan demikian saat ini Desa Bulan hanya mencakupi empat anak kampung, yakni Bung, Anam, Nangka, dan Lagur.

Secara geografis, Desa Bulan memiliki batas-batas sebagai berikut. Bagian timur berbatasan dengan Desa Pong La'o, Desa Lolang, dan Desa Jaong. Bagian selatan berbatasan dengan Desa Nao. Bagian barat berbatasan dengan Desa Cireng dan Desa Ketang. Bagian utara berbatasan dengan Desa Pong Leko. Lokasi Desa Bulan dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Peta Desa Bulan



Berdasarkan data akhir April 2019, jumlah penduduk Desa Bulan sebanyak 3.514 orang. Rinciannya, laki-laki sebanyak 1.755 orang dan perempuan sebanyak 1.759. Jumlah kepala keluarga

di Desa Bulan sebanyak 798 KK. Sebaran jumlah penduduk menurut dusun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1: Data Penduduk menurut Dusun

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		Tota KK
		L	P	
1	Anam	544	512	243
2	Nangka	367	365	178
3	Bung	527	533	230
4	Lagur	317	349	147
	Total	1755	1759	798

Sumber: Dokumen Data Penduduk Desa Bulan

Dari sisi pendidikan, warga Desa Bulan memiliki sebaran tingkat pendidikan sebagai berikut: belum sekolah sebanyak 21,54%, tamat SD sebanyak 28,62%, tidak tamat SD sebanyak 1,48%, tamat SMP sebanyak 8 %, tamat SMA sebanyak 10,13%, tamat perguruan tinggi sebanyak 3,2%.

Tingkat pendidikan warga desa ini tentu masih rendah, meskipun yang tidak tamat SD lebih rendah, yakni 1,48% daripada tamat perguruan tinggi, yakni sebanyak 3,2%. Data pada tabel di bawah ini memperjelas rincian tentang pendidikan warga Desa Bulan, Kecamatan Ruteng.

Tabel 2: Data Penduduk Desa Bulan menurut Tingkat Pendidikan

No	TINGKAT PENDIDIKAN	L	P	L+P	KET
1	Belum Bersekolah	373	384	757	
2	SD/MI Sederajat				
	- Tidak Tamat	28	24	52	
	- Tamat SD	499	507	1.006	
	- Sedang SD	261	264	525	
3	SLTP, MTS/Sederajat				
	- Tidak Tamat				
	- Tamat	142	138	280	
	- Sedang	123	124	247	
4	SLTA/MA/Sederajat				
	- Tidak Tamat				
	- Tamat	178	178	356	
	- Sedang	91	89	180	
5	Perguruan Tinggi				
	- Diploma I dan II	5	3	8	
	- Diploma III / SM	19	15	34	
	- Sarjana/S-1	35	33	68	

- Pasca Sarjana S-2	1	1
Jumlah	1.755	3.514

Sumber: Dokumen Desa Bulan, Data Penduduk Akhir April 2019

Pemilihan Dusun Bung, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai sebagai lokasi PkM tentu didasarkan atas dua pertimbangan mendasar berikut ini. *Pertama*, warga Dusun Bung sebagai bagian utuh dari warga negara Indonesia akan mengikuti Pemilu serentak yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Pemilu sudah di ambang pintu, tetapi ada beberapa pertanyaan pokok yang perlu dilontarkan. Apakah warga Dusun Bung sudah memiliki pemahaman yang komprehensif tentang demokrasi atau Pemilu, apakah mereka menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara demokratis? Apakah mereka sudah memiliki informasi atau pengetahuan yang cukup mengenai tata cara Pemilu? Apakah mereka melek terhadap Undang-Undang Pemilu? Apakah mereka siap terlibat aktif dan cerdas dalam Pemilu? *Kedua*, Dusun Bung, berdasarkan rencana pengembangan Desa Bulan, akan dipersiapkan menjadi desa baru atau desa otonom. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat sudah mengusulkan pemekaran desa ini. Signal positif pengabulan usulan itu pun sudah ada. Meskipun demikian, ada beberapa pertanyaan reflektif berkaitan dengan pemekaran desa ini atau peningkatan status Dusun Bung menjadi desa baru. Apakah warga dusun ini sudah memiliki pemahaman tentang desa, Undang-Undang Desa, dan peran desa dalam konteks otonomi daerah? Apakah warga dusun ini sudah menyiapkan putera/puteri terbaiknya untuk *manage* kepentingan warga dusun ini bila suatu saat berkembang menjadi desa otonom?

Meskipun usia Desa Bulan sudah hampir lima puluh tahun, namun masyarakat desa ini, khususnya warga Dusun Bung, belum menunjukkan kematangan dan kecerdasan yang mumpuni dalam berpolitik atau

berdemokrasi. Berdasarkan pengamatan tim PkM dan hasil diskusi dengan beberapa tokoh penting di desa ini, kami menemukan masalah-masalah sebagai berikut. *Pertama*, masyarakat desa ini belum memiliki pemahaman yang integral tentang politik demokrasi. Kata demokrasi sebenarnya sudah sering mereka dengar dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun pemahaman mereka tentang hakikat demokrasi sesungguhnya masih dangkal dan fragmentaris. *Kedua*, politik uang dan primordialistis. Masih banyak masyarakat di desa ini yang mudah tergiur oleh tawaran uang dalam menentukan pilihan politiknya. Bahkan, ada orang yang melihat pesta demokrasi sebagai momentum untuk mengisi pundi-pundi keuangan. Ada yang menjadi tim sukses untuk beberapa kontestan. Selain itu, pilihan politik juga ditentukan oleh suku atau hubungan tertentu dengan para kontestan demokrasi. Mereka menentukan pilihan bukan pertama-tama karena pengenalan yang mendalam terhadap calon tertentu dan putusan hati nurani, tetapi berdasarkan berapa besar sumbangan yang diberikan atau ditawarkan oleh para kontestan.

Selain itu, pertimbangan hubungan suku atau keluarga menjadi salah satu variabel dalam menentukan pilihan politik. *Ketiga*, kurangnya kepekaan terhadap masalah-masalah sosial. Masyarakat belum melihat dirinya sebagai orang yang terpanggil untuk memecahkan masalah bersama. Masalah-masalah sosial belum menjadi wacana yang serius untuk dibicarakan dalam kehidupan bersama. Pemecahan masalah diserahkan kepada pemerintah. *Keempat*, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik. Masyarakat seringkali hanya menerima hasil dari diskusi-diskusi dan keputusan-

keputusan para elit politik. Politik hanya dipandang sebagai urusan kaum elit. *Kelima*, pemahaman yang dangkal dan fragmentaris macam itu berakibat pada kurangnya penghargaan terhadap keberagaman pilihan politik. Konflik antaranggota keluarga dan antarsuku seringkali terjadi karena perbedaan pilihan politik. *Keenam*, kurangnya agen penggerak keterlibatan orang-orang kecil dalam berpolitik. Kehadiran agen penggerak dalam menginisiasi perjuangan politik masyarakat kecil tentu sangat dibutuhkan. Masyarakat Desa Bulan tentu memiliki potensi-potensi untuk terlibat dalam kegiatan politik, namun kurangnya agen yang memotivasi mereka untuk terlibat membuat potensi itu tidak teraktualisasi dalam praksis politik.

Masalah-masalah di atas membutuhkan penanganan yang serius agar masyarakat menyadari dan menggunakan hak-hak demokrasinya. Hemat kami, pemberdayaan KBG adalah alternatif pemecahan terhadap masalah-masalah di atas. KBG adalah tempat yang strategis untuk meningkatkan kesadaran berdemokrasi warga Dusun Bung, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng. Pemberdayaan KBG ini tentu memiliki efek ganda. Di satu sisi, pemberdayaan KBG dapat meningkatkan kesadaran dan praktik berdemokrasi warga desa, tetapi di sisi lain juga meningkatkan kehidupan beriman warga Dusun Bung, Desa Bulan. Dengan pemberdayaan KBG ini, iman tidak hanya dimaknai sebagai hubungan dengan Tuhan, tetapi juga kepekaan terhadap kehidupan sosial.

SOLUSI YANG DITAWARKAN DAN METODE KEGIATAN

Rendahnya kecerdasan berdemokrasi atau berpolitik merupakan bencana yang sangat serius bagi kelangsungan sistem demokrasi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kami memilih *pemberdayaan KBG* sebagai jalan keluar dari krisis

kecerdasan berdemokrasi yang dialami warga Dusun Bung. Apa itu pemberdayaan? Apa itu KBG? Pemberdayaan adalah “kemampuan individu atau kelompok untuk membuat pilihan-pilihan yang efektif, mentransformasikan pilihan-pilihan itu ke dalam tindakan-tindakan dan hasil-hasil yang diinginkan” (Alsop, Bertelsen, Holland, 2006: 16). Definisi ini mengandung tiga dimensi penting berkaitan dengan pemberdayaan, yakni agensi, peluang struktur dan tingkat pemberdayaan. Agensi adalah kemampuan pelaku atau kelompok untuk membuat pilihan-pilihan yang efektif. Dalam hal ini pelaku (individu atau kelompok) mampu mempertimbangkan dan mengefektifkan pilihan-pilihan yang ada. Tetapi agensi tidak sama dengan pemberdayaan. Karena pemberdayaan bukan hanya menyangkut kemampuan untuk membuat pilihan, tetapi juga menyangkut pemanfaatan pilihan itu demi mencapai hasil yang diinginkan atau mencapai perubahan yang diharapkan. Transformasi pilihan ke dalam tindakan bergantung pada peluang struktur yang ada di mana pilihan itu beroperasi. Agensi adalah salah satu syarat mutlak agar orang atau kelompok berdaya. Tetapi aktualisasinya tergantung pada peluang struktur yang ada (Alsop, Bertelsen, Holland, 2006: 17).

Peluang struktur terdiri dari institusi-institusi yang mengatur tingkah laku masyarakat dan yang memengaruhi sukses atau gagalnya pilihan-pilihan yang mereka buat. Institusi itu bisa berupa institusi formal atau informal. Peluang struktural, agensi dan pilihan memiliki hubungan yang sangat erat. Ketiganya mutlak diperlukan agar proses pemberdayaan itu berjalan. Ketiganya saling mengandaikan dan menentukan. Pilihan dapat ditransformasikan ke dalam tindakan kalau ada agensi dan peluang struktural. Bila orang atau kelompok mempunyai pilihan, tetapi mereka tidak memiliki agensi dan peluang struktural

maka pilihan itu sulit diwujudkan nyata ke dalam tindakan. Bila orang atau kelompok memiliki agensi, tetapi mereka tidak mempunyai pilihan dan peluang struktural maka agensi itu tetap menjadi sesuatu yang potensial. Demikian juga, orang atau kelompok yang mempunyai peluang struktural, tetapi tidak memiliki agensi dan pilihan maka peluang struktural itu tidak berguna.

Apakah hakikat KBG itu? Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik mengenai tugas misioner Gereja *Redemptoris Missio* (RM), artikel 51, menyatakan sebagaimana berikut.

Komunitas Basis Gerejawi merupakan suatu pratanda dari daya hidup (*vitalitas*) Gereja sendiri, suatu perangkat untuk pembentukan dan pewartaan Injil, serta menjadi permulaan yang mantap bagi suatu masyarakat baru yang berdasarkan cinta kasih. Komunitas-komunitas tersebut bersifat desentral dan membentuk perkumpulan-perkumpulan komunitas paroki, di mana perkumpulan-perkumpulan itu senantiasa dipersatukan ..., dalam perkumpulan itu setiap orang Kristen mengalami perkembangan komunitasnya bahkan rasa dan makna dari komunitas, di mana mereka berperan aktif dan terdorong untuk berbagi pengalaman serta pemahaman di dalam tugas bersama ... berbarengan dengan itu, berkat karunia cinta Kristus, komunitas-komunitas basis juga menunjukkan betapapun peliknya masalah yang dihadapinya seperti perpecahan atau konflik, masalah kesukuan, atau ras, ternyata bisa diatasi.

Seturut rumusan SAGKI 2000, Komunitas Basis Gerejani dipahami sebagai salah satu cara baru hidup menggereja, yakni “satuan umat yang relatif kecil dan mudah berkumpul untuk mendengarkan firman Allah, berbagi masalah sehari-hari, baik masalah pribadi, kelompok maupun masalah sosial, dan mencari pemecahannya

dalam terang Kitab Suci. Komunitas basis seperti itu terbuka untuk membangun suatu komunitas yang juga merangkul saudara-saudara beriman lain ... komunitas basis itu diinspirasi oleh teladan hidup umat perdana seperti dituliskan dalam Kitab Suci. Dengan demikian, komunitas basis bukan sekadar tampak sebagai bentuk atau wadah, dan bukan pula sekadar istilah atau nama, melainkan Gereja yang hidup bergerak dinamis dalam pergumulan iman”. Gereja dengan demikian lebih mengakar, lebih kontekstual, dan mampu menjalankan perannya dalam menggarami dunia dengan lebih baik (SAGKI, No.10).

Ada empat ciri kunci dari Komunitas Basis Gerejani. *Pertama*, ia adalah sebuah persekutuan-umat yang relatif kecil, inklusif, dan warganya bertemu secara berkala dengan komitmen tertentu. *Kedua*, inspirasi dasar untuk aksi dan refleksinya adalah Kitab Suci. Itu berarti bahwa Sabda Allah adalah titik tolak aksi dan komitmen mereka di dalam KBG. *Ketiga*, memiliki pemahaman yang memadai tentang situasi, baik situasinya sendiri maupun situasi sesama di sekitarnya. *Keempat*, arah dan perjuangannya adalah menuju keadilan dan perdamaian bersama. Karena itu, kehadiran KBG selalu bersifat transformatif (Koten, 2009: 5-6).

Untuk mengatasi masalah rendahnya kecerdasan berdemokrasi warga Dusun Bung, Desa Bulan, maka ada dua kegiatan pokok yang dilakukan. **Pertama**, pemberdayaan Komunitas Basis Gerejani. Pemberdayaan KBG mencakup aspek-aspek berikut. *Pertama*, penguatan agensi. Keberhasilan pemberdayaan ditentukan oleh sejauh mana agen pemberdayaan memiliki kemampuan dan komitmen untuk menginisiasi gerakan-gerakan pembebasan di tengah masyarakat. Dalam konteks PkM, penguatan agen yang dimaksudkan adalah konsientisasi para ketua KBG agar memiliki wawasan politik yang memadai. KBG bukan

hanya komunitas doa, tetapi juga komunitas yang mampu menciptakan transformasi sosial. Selain penguatan wawasan politik, para ketua KBG juga diberikan pelatihan kepemimpinan agar mereka mampu tampil sebagai agen penggerak perubahan sosial di tengah masyarakat. Keterampilan ini mencakup keterampilan analisis sosial dan keterampilan manajerial. *Kedua*, memperkuat posisi KBG sebagai peluang struktural untuk menginisiasi gerakan pembebasan. Dalam perspektif teori pemberdayaan, peluang struktural merupakan salah satu variabel penting bagi terciptanya transformasi sosial. *Ketiga*, mengekstensifikasi kegiatan-kegiatan di dalam KBG. KBG tidak cukup hanya berurusan dengan pelayanan sakramental dan administratif gerejani, tetapi juga ekonomi keselamatan manusia di dunia ini.

Kedua, Pendidikan Politik bagi warga KBG. Pendidikan politik ini dimaksudkan sebagai usaha men-*share*-kan hakikat politik bagi warga KBG. Mereka diajarkan konsep-konsep dasar tentang politik, hak dan kewajiban warga negara dalam konteks sistem demokrasi, sistem pemerintah otonomi daerah, saluran-saluran partisipasi masyarakat dalam menegakkan negara demokrasi.

Untuk memperlancar dan memudahkan peserta memahami materi yang dibicarakan dalam kegiatan PkM, kami menggunakan beberapa metode. Metode-metode yang digunakan dalam PkM ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, metode *sharing* dan diskusi. Mengingat peserta kegiatan ini umumnya orang dewasa, maka pendekatan andragogis digunakan oleh tim PkM dalam membawakan materi yang ada. Dalam membawakan tema “Politik Demokrasi dan Tanggung Jawab Warga Negara”, tim PkM mulai dengan menggali pemahaman mereka mengenai demokrasi. Istilah ini sudah lama didengar dan juga masyarakat menjadi pelaku demokrasi. Karena itu, kami meminta mereka men-*share*-kan pemahaman dan keterlibatan mereka

tentang politik dan demokrasi. Berdasarkan *sharing* ini, tim membuat *stressing* untuk beberapa pemahaman yang positif dan substantif tentang politik dan demokrasi, tetapi untuk pemahaman yang kurang tepat diluruskan melalui penjelasan-penjelasan. Demikian juga pemaparan berkaitan dengan materi KBG sebagai Basis Perjuangan Politik. Tim mulai dengan meminta mereka *sharing* tentang persepsi mereka mengenai KBG dan bagaimana praktik hidup mereka di dalam KBG. Setelah mendengar *sharing* peserta, tim memberikan penjelasan yang komprehensif tentang KBG dan peluang KBG digunakan sebagai basis perjuangan politik warga negara.

Kedua, metode ceramah dan tanya-jawab. Metode ini digunakan pada waktu memberikan materi tentang “Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Negara Demokrasi dan Tata Cara Pemilihan Umum 2019”. Kami mulai dengan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Pada bagian akhir dari tema ini, kami berbicara tentang tata cara pemilihan umum 2019. Kami menjelaskan aturan-aturan pemilu dan cara melakukan pencoblosan di bilik pemungutan suara. Kami juga memotivasi peserta untuk memanfaatkan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019. Tema tentang “Sistem Pemerintahan dan Otonomi Daerah” juga dibawakan dengan menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab. Tim PkM menjelaskan hakikat otonomi daerah dalam system pemerintahan pasca reformasi. Setelah mendengar penjelasan, para peserta diberi kesempatan untuk bertanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PkM dengan fokus meningkatkan kecerdasan berdemokrasi melalui pemberdayaan Komunitas Basis Gerejani (KBG) telah dilaksanakan dalam kurung waktu tiga (3) bulan, yakni Maret s.d. Mei 2019. Kegiatan PkM telah berjalan sesuai dengan rencana

yang telah disepakati dengan masyarakat Dusun Bung sebagai kelompok sasaran. Mereka telah memberikan kontribusi yang bermutu bagi kelangsungan kegiatan PkM ini. Tingkat partisipasi mereka sangat tinggi. Antusiasme dalam kegiatan juga sangat baik. Tim PkM dari kampus STKIP Santu Paulus Ruteng, khususnya dari Prodi Pendidikan Teologi berperan sebagai agen pencerahan dan fasilitator kegiatan.

Untuk memotret keberhasilan kegiatan PkM di Dusun Bung, Desa Bulan ini, tim PkM melakukan evaluasi dengan warga Dusun Bung sebagai subjek PkM. Evaluasi kami lakukan dalam bentuk *focus group discussion* (FGD). Tim PkM memandu peserta dengan pertanyaan-pertanyaan yang terfokus pada manfaat kegiatan PkM ini bagi mereka. Selain itu, mereka juga diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasan atau pendapat berkaitan dengan kegiatan yang telah kami lakukan. Uraian berikut merupakan hasil dan pembahasan.

Pertama, meningkatnya pengetahuan tentang Politik. Kegiatan PkM dirancang untuk mencerahkan masyarakat Dusun Bung dalam bidang politik. Warga dusun Bung umumnya masyarakat sederhana dengan tingkat pendidikan yang terbatas. Kondisi seperti ini berpengaruh terhadap wawasan mereka. Mereka memiliki akses yang sangat terbatas ke sumber-sumber pengetahuan berkaitan dengan politik. Kondisi mereka sebagai petani yang hari-harinya bergumul dengan sawah dan ladangnya membuat mereka semakin asing dengan wacana-wacana politik. Oleh karena itu, kegiatan PkM ini pertama-tama diarahkan pada usaha *men-share*-kan pengetahuan-pengetahuan tentang politik. Mereka harus memiliki pengetahuan tentang politik karena eksistensi mereka yang politis. Karena itu, hasil berbagi bersama pengetahuan tentang politik dimaksudkan untuk membantu mereka memahami jati diri sebagai *zoon politikon* atau makhluk politik. Politik

adalah sarana perwujudan diri manusia. Politik berlangsung di antara manusia-manusia maka politik berada di luar manusia. Politik adalah kebersamaan dan ketersalingan dalam perbedaan (Madung, 2009: x-xi).

Warga Dusun Bung, sebagai kelompok sasaran dari kegiatan PkM, mengakui bahwa kegiatan PkM yang telah kami lakukan membantu mencerahkan pandangan mereka tentang politik demokrasi. Mereka merasa diperkaya dengan pengetahuan-pengetahuan yang telah disharingkan oleh tim PkM. Mereka sebelumnya merasa sangat terbatas pengetahuan politiknya, dengan kegiatan PkM ini mereka mengalami perubahan perbendaharaan pengetahuan. Mereka mengakui bahwa sebelumnya mereka memahami politik hanya sebatas hal yang diperagakan para pemimpin atau politisi. Namun, dengan PkM ini mereka mendapatkan konsep dan penjelasan yang memadai tentang politik. Warga Dusun Bung sebelumnya menganggap politik hanya sebagai urusan segelintir orang atau elit sosial. Sesudah PkM ini mereka memaknai politik sebagai urusan semua warga negara. Politik dimaknai sebagai bagian utuh dari hidup manusia. Politik sebagai perjuangan bersama untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Kedua, ada komitmen untuk tidak menggadaikan suara dengan uang atau gratifikasi tertentu. Pemilu sering dimaknai sebagai pesta demokrasi, pesta kekuasaan rakyat. Mengapa? Melalui Pemilu, setiap warga negara yang memenuhi syarat konstitusional dapat menggunakan haknya untuk menentukan pilihan politik. Pemilu menjadi momentum bagi rakyat untuk menentukan pemimpin yang mampu mewujudkan kemaslahatan bersama. Suara rakyat dalam Pemilu dimakna sebagai suara Tuhan. Idealisme seperti ini memudar karena prakti-praktik politik yang sangat pragmatis. Warga negara yang seharusnya otonom dengan mudah dikuasai oleh uang. Rakyat

dengan mudah menggadaikan suaranya dengan uang. Hal seperti ini terjadi karena para pemimpin atau elit politik sering menjadikan kekuasaan sebagai kesempatan untuk melakukan korupsi. Kenyataan seperti ini membuat masyarakat berandai bahwa mereka hanya mendapat keuntungan pada saat sebelum pemilihan umum, yakni dengan uang yang diberikan oleh para kontestan demokrasi electoral. Harman melihat korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara sebagai hambatan terbesar mewujudkan kemaslahatan bersama. Harman (2011: x) menulis sebagaimana berikut.

Cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan umum terus tergerus oleh korupsi yang menjangkiti para penyelenggara negara. Ekonomi politik yang tidak berpihak pada warga negara juga telah mengikis keyakinan kita semua akan pentingnya berhimpun dalam sebuah bangsa. Sementara itu, korupsi telah menjadi instrument serius yang terus menerus menjauhkan warga negara dari cita-cita dan harapan menuju kesejahteraan umum.

Korupsi para penyelenggara negara membuat masyarakat berprasangka bahwa para elit politik hanya memperjuangkan kepentingan pribadi atau golongannya. Karena itu, ketika para kontestan politik melakukan praktik politik uang demi meraih kekuasaan, ada warga negara yang tidak melihat ini sebagai penyimpangan terhadap demokrasi.

Dalam kesempatan diskusi dengan warga Dusun Bung, ada yang mengatakan bahwa ketika ada calon legislatif, tim sukses calon bupati, gubernur dan presiden yang memberikan uang kepada warga sebelum pemilihan umum berlangsung, mereka menerima dengan senang hati. Ada juga caleg atau timses tertentu yang menjanjikan jabatan tertentu kepada anggota keluarga mereka. Ini dianggap sebagai rahmat atau rezeki bagi mereka.

Namun sesudah pencerahan melalui kegiatan PkM ini, mereka menyadari bahwa politik uang justru menyuburkan praktik korupsi. Praktik seperti ini tentu membuat masyarakat semakin menderita. Karena itu, ada komitmen dalam diri warga Dusun Bung untuk menolak politik uang atau segala bentuk gratifikasi yang diberikan oleh para kontestan demokrasi electoral pada Pemilu 17 April 2019. Mereka berkomitmen untuk memilih calon legislatif dan presiden yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ketiga, meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Salah satu ekspresi hak politik masyarakat adalah terlibat dalam pemilihan wakilnya atau pemimpinnya dalam institusi pemerintahan. Keberhasilan sebuah demokrasi elektoral ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam demokrasi. Berdasarkan sharing dari beberapa panitia pemungutan suara pada pemilihan umum serentak yang telah berlangsung diketahui bahwa antusiasme masyarakat untuk datang ke TPS sangat tinggi. Semua warga yang mendapat surat panggilan datang ke TPS. Para lansia pun, menurut mereka, berusaha datang ke TPS. Warga yang lain mensharingkan bahwa sebelumnya mereka bersikap masa bodoh dengan Pemilu atau tidak menggunakan hak politiknya, tetapi pada Pemilu serentak 17 April 2019, mereka datang dengan senang hati ke TPS. Mereka tidak mau melewatkan kesempatan pemungutan suara. Mereka bahkan berharap bahwa calon yang mereka pilih bisa memenangkan kontestasi baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden.

Keempat, ada komitmen untuk berpartisipasi dalam mengontrol kebijakan publik. Perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan dari sentralisasi ala Orde Baru ke paradigma desentralisasi pasca reformasi membutuhkan perhatian dan komitmen

serius dari masyarakat. Pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola pemerintahan daerah membutuhkan pengawalan yang serius dari publik. Bila publik tidak mampu menjalankan fungsi kontrol dengan baik, maka akan tercipta “raja-raja kecil” di daerah. Untuk membantu masyarakat memahami perannya dalam konteks sistem desentralisasi, maka tim PkM memberikan materi tentang sistem pemerintahan dan otonomi daerah. Berdasarkan sharing peserta PkM, diketahui bahwa dengan penjelasan yang diberikan oleh tim PkM, mereka kemudian sadar bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mengawal setiap kebijakan publik. Mereka merasa bahwa selama ini mereka menganggap pengawalan kebijakan publik bukan urusan mereka.

Persekongkolan kepentingan antarelit politik bisa menciptakan stabilitas semu. Ketika mereka tidak lagi serius mewacanakan kepentingan rakyat, di sana ada bahaya bahwa kepentingan pribadi dan golongan bercokol. Pada panggung depan politik mereka mempertontonkan keberpihakan semu. Ada debat dan diskusi yang kelihatannya sangat alot, namun pada panggung belakang politik bersemi pertukaran kepentingan dan keuntungan. Hal yang dibicarakan pada panggung belakang seringkali bukan kepentingan umum, tetapi kepentingan pribadi dan golongan atau partai.

Madung melihat bahwa praktik kartel politik dalam sistem politik demokrasi bisa menjadi bumerang bagi sistem kontrol atau penegakan prinsip *check and balance* dalam demokrasi. Ketika tidak ada lagi oposisi yang kritis dan tangguh dalam suatu negara demokrasi, maka praktik pembagian keuntungan untuk segelintir elit pasti berumbuh subur. Madung (2011: 182) menulis sebagai berikut.

Pengaruh sistem kartel politik tampak dalam monopoli kekuasaan berupa koalisi besar yang mengeliminasi

kemungkinan terbentuknya oposisi. Para lawan politik dirangkul. Partai-partai oposisi bekepentingan untuk masuk dalam partai penguasa demi meminimalisasi kerugian yang diakibatkan oleh kekalahan...Kartel polituk akhirnya bermuara pada hancurnya fungsi institusi-institusi demokratis.

Ketika partai-partai politik atau institusi demokratis yang diharapkan menjadi pengontrol kekuasaan tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka warga negara diharapkan memainkan peran yang signifikan untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Hal seperti ini terwujud bila warga negara sadar mengenai tugas dan tanggung jawabnya di dalam negara.

Kelima, ada perubahan pandangan tentang peran Komunitas Basis Gerejani. Fokus dari PkM ini adalah pemberdayaan KBG sebagai jalan untuk meningkatkan kecerdasan berdemokrasi warga Dusun Bung. Dalam PkM kami memberikan penjelasan yang cukup komprehensif tentang KBG. Ini dilakukan agar warga Dusun Bung memiliki pemahaman yang utuh tentang KBG. Setelah mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai KBG, mereka sadar bahwa KBG tidak hanya dipahami secara sempit sebagai basis kegiatan rohani atau liturgi Gereja, tetapi juga harus dipahami secara lebih luas sehubungan dengan aspek sosio-politis warga KBG. Ada komitmen untuk memperluas kegiatan-kegiatan di dalam KBG yang berhubungan peningkatan kesejahteraan hidup bersama. Ada keinginan untuk menjadikan KBG sebagai wadah perjuangan bersama demi mencapai kesejahteraan atau kebahagiaan. Untuk mewujudkan hal ini mereka berbicara tentang cara merekrut pemimpin KBG yang handal. Model pemilihan pemimpin KBG yang mereka lakukan selama ini dinilai kurang efektif karena tidak ada proses seleksi yang matang, bahkan orang secara sukarela saja menjadi pemimpin KBG tanpa

mempertimbangkan kapabilitas dan keterampilannya dalam memimpin.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut. *Pertama*, masyarakat harus mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang politik agar mereka bisa berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan proyek kesejahteraan bersama. Sikap indifferen dan apolitis yang ditunjukkan oleh masyarakat bukan pertama-tama karena faktor internal, tetapi lebih karena lemah atau kurangnya perhatian pihak eksternal, entah itu elit politik atau lembaga pendidikan, dalam melakukan kegiatan pencerahan masyarakat. *Kedua*, kegiatan PkM ini bermanfaat bagi warga Dusun Bung, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng,

Kabupaten Manggarai. Mereka mengalami transformasi dalam banyak aspek, baik itu pada level penguasaan pengetahuan maupun pada level kesadaran dan komitmen untuk menunjukkan peran-peran yang signifikan sebagai warga negara. *Ketiga*, upaya yang telah dilakukan tim PkM Prodi Pendidikan Teologi STKIP Santu Paulus Ruteng baru tahap awal dari langkah-langkah besar dan strategis lainnya pada masa yang akan datang untuk memaksimalkan peran warga Dusun Bung dalam mewujudkan politik demokratis di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun ini sebuah langkah kecil, namun inisiasi ini telah membuahkan hasil. Dengan ini diharapkan upaya-upaya yang lebih komprehensif dan terukur dapat dilakukan pada masa-masa mendatang.

DAFTAR RUJUKAN

- Alsop, R. M. F. Bertelsen, dan J. Holland. 2006. *Empowerment in Practice, From Analysis to Implementation*. Washington: Worl Bank.
- Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristekdikti. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Ristekdikti.
- Dokumen Data Penduduk Desa Bulan Tahun 2019.
- Jhon Paul II, Paus. Ensiklik *Redemptoris Missio*.
- Koten, Philipus Panda, 2009. *Potret Komunitas Basis Gerejani Kita*. Mamere: Ledalero.
- Madung, Gusti Otto, 2009. *Politik antara Legalitas dan Moralitas*. Maumere: Ledalero.
- _____. 2011. *Politik Diferensiasi Versus Politik Martabat Manusia?*. Maumere: Ledalero.
- Padila, Estela dan Prior Anselm, 200. *Membangkitkan Kesadaran*. Maumere: LPBAJ.
- Rangkuman Hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia Tahun 2000. *Spektrum*, No. 1 Tahun XXIX. 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum